

## Penerapan Federalisme Atas Konflik Sudan

Ahmad Dliya'ul Mubarak

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[Ayokaegis89@gmail.com](mailto:Ayokaegis89@gmail.com)

---

Received: 30-02-2024

Revised: 05-03-2024

Accepted: 27-04-2024

---

### Abstract

Sudan as a multiethnic country with a long history of conflict and political instability, faces significant challenges in building an inclusive and sustainable governance structure. One proposed solution to address inter-regional conflicts and power imbalances is the implementation of federalism. This research aims to analyze the potential for federalism in Sudan, highlighting opportunities, challenges, and the necessary steps for implementing this system of governance. Through a literature review and comparative analysis with other countries sharing similar characteristics, this study finds that federalism could provide greater autonomy to marginalized regions. However, its implementation in Sudan faces numerous obstacles, including ethnic conflicts, economic disparities, and resistance from dominant military groups. Therefore, legal and constitutional reforms, along with international community support, are essential to ensure an effective transition to federalism. The study concludes that while federalism is not an instant solution, it offers Sudan the opportunity to establish a more equitable and stable governance framework. Strategic recommendations are provided for the Sudanese government, civil society groups, and international stakeholders to support the future adoption of federalism.

**Keywords:** *Sudan, Federalism, Governance, Ethnic Conflict, Decentralization.*

### Abstrak

Sudan sebagai negara multi-etnis dengan sejarah panjang konflik dan ketidakstabilan politik, menghadapi tantangan besar dalam membangun tata negara yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi konflik antarwilayah dan ketimpangan kekuasaan adalah penerapan federalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan federalisme di Sudan, dengan menyoroti peluang, tantangan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan ini. Melalui kajian literatur dan analisis perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa, penelitian ini menemukan bahwa federalisme dapat memberikan otonomi yang lebih besar kepada wilayah-wilayah yang selama ini termarginalkan. Namun, penerapannya di Sudan menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik antar-etnis, ketidakseimbangan ekonomi, dan resistensi dari kelompok militer yang dominan. Untuk itu, reformasi hukum dan konstitusi, serta dukungan komunitas internasional, diperlukan guna memastikan transisi yang efektif menuju federalisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun federalisme bukan solusi yang instan, sistem ini menawarkan peluang bagi Sudan untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan stabil. Rekomendasi strategis diberikan untuk pemerintah Sudan, kelompok masyarakat sipil, dan pihak internasional dalam mendukung penerapan federalisme di masa depan.

**Kata Kunci:** *Sudan, Federalisme, Tata Negara, Konflik Etnis, Desentralisasi*



## PENDAHULUAN

Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kaya. Namun juga menghadapi tantangan besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang stabil. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Sudan mengalami konflik berkepanjangan, terutama di wilayah-wilayah seperti Darfur, Blue Nile, dan Kordofan. Konflik ini dipicu oleh ketimpangan kekuasaan yang terpusat di ibu kota Khartoum, marginalisasi wilayah pinggiran, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat setempat.

Tiga Kota penting yang menjadi awal gejolak Sudan adalah Darfur dulunya adalah suatu desa yang bernama Darul Furqan,<sup>1</sup> dinamakan Darul Furqan dikarenakan pada saat sebelum *genosida* terkenal dengan penghafal Al Qur'an yang hampir 40%, dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebagaimana dilansir di media BBC pasca gejolak kemanusiaan, penduduk Sudan mencari suaka ke negara tetangga, Chad yang merupakan perbatasan barat negara Sudan.<sup>2</sup> Darfur merupakan wilayah utama bagi golongan Islamis yang dibawah oleh Hasan Turobi,<sup>3</sup> tokoh Ihwanul Muslimin juga sebagai mentor politik dari Oemar Bashir yang berkuasa selama 30 tahun, periode 1989-2019.

Dari Darfur pada tahun 2003, muncul dua gerakan pemberontak Tentara Pembebasan Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan, mayoritas mereka berasal dari kalangan petani yang memprotes ketidakadilan di bawah pemerintah Sudan, dan didominasi oleh orang-orang Arab. Untuk mengimbangi dua gerakan tersebut Oemar Bashir membentuk pasukan gerak cepat atau *da'mu syari'* ringkasnya populer disebut *Janjawit* istilah orang sudan sebagai tentara bayaran.

Ketegangan yang terus berlanjut menciptakan instabilitas politik, krisis kemanusiaan, dan hambatan besar terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks ini, federalisme muncul sebagai salah satu solusi potensial yang dapat mengatasi masalah ketimpangan kekuasaan dan konflik etnis di Sudan. Adakalanya konflik etnis di Sudan tidak disebabkan karena politik, misalnya di wilayah Sahel,<sup>4</sup> konflik ditengarai perubahan iklim sehingga saling berebut lahan untuk menggembala.

Dengan memberikan otonomi lebih besar kepada wilayah-wilayah termarjinalkan, federalisme dapat menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan merata. Namun,

---

<sup>1</sup> Interview dengan penduduk Sudan, salah satu kawan di Sudan di Afrika mengatakan; "*kini banyak di daerah darfur masyarakatnya tergeser dan terdistorsi dari penghafal Al Qur'an menjadi milisi (janjawid)*"

<sup>2</sup> [اشتبكات السودان: أزمة في دارفور بعد تدمير "كل ما يمكن للمدنيين استخدامه" - BBC عربي](#) , ٢٩ مايو / أيار ٢٠٢٣ , "اشتبكات السودان: أزمة في دارفور بعد تدمير "كل ما يمكن للمدنيين استخدامه" في دارفور بعد تدمير

<sup>3</sup> Abdul Karim, *Tafsir At Taubidi Hasan Turobi*, (Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir; issn 19077246 IAIN Kudus).

<sup>4</sup> Sudan-Afrika utara, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan penggembala yang nomadik.

implementasi sistem federal di Sudan memerlukan kajian mendalam terhadap tantangan dan peluang yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan federalisme di Sudan sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan konflik etnis, mendistribusikan kekuasaan secara adil, dan menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Studi ini juga mengeksplorasi reformasi hukum dan konstitusional yang dibutuhkan, serta peran komunitas internasional dalam mendukung transisi menuju federalisme di negara tersebut.

Federalisme, sebagai sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas wilayah,<sup>5</sup> menawarkan solusi yang menarik bagi Sudan, mengingat keragamannya yang besar dan ketegangan antar kelompok etnis. Dengan mengadopsi federalisme, Sudan dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih adil, memberikan otonomi yang lebih besar kepada wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, seperti Darfur, Blue Nile, dan Kordofan. Pendekatan ini berpotensi memperbaiki ketimpangan yang ada, dengan mengakomodasi berbagai identitas etnis, budaya, dan agama yang ada di dalamnya.

Lebih lanjut, federalisme dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal, mengurangi ketegangan antara pusat dan daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah. Dengan adanya desentralisasi, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan mineral, bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut dengan lebih efisien, tanpa terpusat di pemerintahan pusat yang selama ini sering dianggap tidak adil. Oleh karena itu, federalisme tidak hanya menjadi alat untuk meredakan konflik, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Sudan.

Namun, penerapan federalisme di Sudan bukan tanpa tantangan. Ketegangan antar kelompok etnis, dominasi militer, dan ketimpangan sosial-ekonomi di berbagai wilayah menjadi hambatan besar yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana federalisme dapat diterapkan secara efektif di Sudan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapinya. Penelitian ini berusaha untuk menggali potensi dan tantangan tersebut, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana Sudan dapat menjalani transisi menuju sistem federal yang lebih stabil dan adil. Dari sini muncul suatu pertanyaan yang mendasar, apakah federalisme dapat menjadi sistem tata negara yang efektif untuk Sudan?

---

<sup>5</sup> Taufikurrahman, Taufikurrahman, and Dina In'am Nurida. 2023. "Nilai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Islam". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (3), 455-65. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3552>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam potensi penerapan federalisme di Sudan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang menyeluruh terhadap situasi yang kompleks, terutama dalam konteks sosial-politik Sudan yang penuh dinamika.

Penelitian dimulai dengan **kajian literatur**, di mana data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah Sudan, laporan KBRI Khartoum dan catatan eks anggota PPI Sudan yang memberikan wawasan tambahan tentang kondisi aktual di lapangan, khususnya terkait dinamika sosial dan progres yang dihadapi oleh masyarakat Sudan dalam konteks sosial-politik Sudan serta potensi penerapan federalisme sebagai solusi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, **analisis komparatif** yakni membandingkan pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan federalism, seperti; Ethiopia, Nigeria, dan India.

Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi**, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti literatur, wawancara, dan studi kasus. Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam laporan akhir yang tidak hanya menggambarkan temuan utama, tetapi juga memberikan **rekomendasi strategis** bagi berbagai pemangku kepentingan dan menelaah solusi pemerintahan Sudan dalam perspektif Hukum Tata Negara, masyarakat sipil, serta komunitas internasional.

Penelitian ini mengembangkan teori Montesquieu, seorang filsuf Prancis salah satu pendiri ide federalisme modern dalam karyanya *The Spirit of the Laws* (1748). Montesquieu mengusulkan bahwa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menciptakan keseimbangan yang sehat dan menghindari tirani.<sup>6</sup> Konsep ini menjadi landasan teori federalisme di banyak negara, terutama di negara-negara yang mengalami keragaman sosial dan budaya.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pemerintahan Sebelumnya; Sentralisasi era Kolonial dan Pascakemerdekaan

#### 1. Era Kolonial

Selama era kolonial, Sudan berada di bawah pemerintahan Inggris dan Mesir, yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga kemerdekaan pada 1956. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang diterapkan di Sudan sangat sentralistik dan didasarkan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial di pusat. Pemerintahan kolonial memusatkan segala

---

<sup>6</sup> Montesquieu, *The Spirit of The Law Montesquieu*, (Printed J.Nourse and P. Vaillant, in the strand MDCCI), 42.

<sup>7</sup> Mardila, Riana. 2024. "Ummah for Earth: The Influence of Religious Soft Power Manifestation in Greenpeace Indonesia's Strategies". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (3), 571-89. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.4771>.

kekuasaan di Khartoum, ibu kota Sudan, dengan kontrol Hasan Turobi Tata Kelola pemerintahannya cenderung Teokratis meletakkan prinsip Islam ditengah di tengah multikultural, karena Sudan terdiri dari banyak etnis dan agama, dan sangat sedikit diberikan kepada wilayah-wilayah luar yang lebih terpencil, seperti Darfur, Blue Nile, dan Kordofan.

Menurut Abdullah Al Ghallab salah seorang pengamat politik Sudan,<sup>8</sup> dikutip dalam bukunya *"Hasan al-Turabi not only as an Islamist leader but also as a victim of his own ideology. Gallab notes that "Islamism, like other ideologies, often becomes a crucible for violence and wrongdoing." This perspective is crucial to understanding Turabi's failure to achieve stability in Sudan through the application of Islamism"*. Hasan al-Turabi tidak hanya sebagai seorang pemimpin Islamis, tetapi juga sebagai korban dari ideologinya sendiri. Gallab mencatat bahwa *"Islamisme, seperti ideologi lain, sering menjadi landasan kekerasan dan kejahatan."* Hal ini relevan untuk memahami kegagalan Turabi dalam mencapai stabilitas di Sudan melalui Islamisme.

Sentralisasi-religius terlihat jelas dalam pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Kolonialisme Inggris-Mesir lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam Sudan dan penguatan posisi mereka di wilayah tersebut, sementara kebutuhan dan aspirasi wilayah-wilayah yang lebih terpencil sering kali diabaikan. Dalam praktiknya, pemerintahan kolonial tidak memberikan kesempatan kepada kelompok etnis dan budaya lokal di daerah-daerah seperti Darfur untuk mengelola urusan mereka sendiri. Sebaliknya, keputusan-keputusan penting terkait kebijakan ekonomi, sosial, dan politik diambil oleh pemerintah pusat yang tidak mengindahkan keragaman etnis maupun kebutuhan lokal.

Selama periode ini, ketegangan antara kelompok etnis juga mulai muncul sebagai akibat dari kebijakan yang tidak adil dan pengabaian terhadap wilayah-wilayah yang terpinggirkan. Salah satu contoh penting adalah kebijakan kolonial yang cenderung lebih memprioritaskan pengelolaan wilayah utara yang lebih dekat dengan Khartoum, sedangkan daerah-daerah seperti Darfur dan Kordofan dibiarkan tanpa perhatian yang memadai dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini menciptakan perasaan ketidakadilan di kalangan kelompok etnis yang merasa bahwa mereka diperlakukan sebagai warga kelas dua, yang pada akhirnya memperburuk hubungan antar kelompok etnis di Sudan.

Setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, sistem pemerintahan yang diadopsi oleh negara baru ini tetap sangat terpusat. Pemerintah pusat di Khartoum mempertahankan kontrol penuh atas kebijakan nasional, termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, dan

---

<sup>8</sup> Abdullah Al Ghallab, *Hasan al-Turabi, the Last of the Islamists: (The Man and His Times 1932–2016)*, 115.

<sup>9</sup> Robert O. Collin, *A History of Modern Sudan*, (Cambridge University Press 978-0-521-85820-5, 1933), 81.

pembangunan, tanpa memberikan otonomi yang memadai kepada wilayah-wilayah lain, khususnya yang lebih terpencil dan terpinggirkan. Struktur sentralistik yang diterapkan pascakemerdekaan ini pada akhirnya memicu ketidakpuasan di banyak wilayah, terutama di selatan Sudan, yang kemudian berujung pada **Perang Saudara Sudan pertama (1955-1972)**.

Sentralisasi pemerintahan pasca kemerdekaan juga memperburuk ketidakadilan dan ketimpangan yang telah ada selama era kolonial. Wilayah Darfur, Blue Nile, dan Kordofan tetap terabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk mengelola urusan lokal mereka. Masyarakat di daerah-daerah ini merasakan marginalisasi yang semakin besar, yang mendorong ketegangan etnis dan sosial. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak mencerminkan kebutuhan atau keinginan kelompok etnis di wilayah-wilayah tersebut, yang semakin merasa terpinggirkan.

Konflik yang terjadi di Sudan tidak hanya bersifat etnis, tetapi juga melibatkan pertentangan antara agama dan budaya. Pemerintah pusat yang berpusat di Khartoum cenderung mengutamakan kepentingan kelompok Arab dan Muslim di utara, sementara masyarakat non-Arab dan non-Muslim, seperti yang ada di wilayah selatan Sudan dan daerah-daerah lainnya, sering kali diperlakukan tidak adil. Ketidakpuasan ini akhirnya berkembang menjadi pemberontakan dan konflik yang lebih besar, dengan perang saudara yang berlangsung lebih dari dua dekade (1983-2005) yang sangat menghancurkan negara ini. Konflik ini juga dipicu oleh ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, di mana wilayah-wilayah luar dan selatan merasa diperlakukan sebagai wilayah kolonial yang tidak memiliki kekuatan politik atau pengaruh.

## 2. Implikasi Sentralisasi Terhadap Ketidakstabilan Pemerintahan

Pemerintahan sentralistik yang terus berlanjut pasca kemerdekaan menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di Sudan. Dengan pusat pemerintahan yang mengabaikan keberagaman etnis dan kebutuhan lokal, ketegangan antar kelompok etnis dan agama semakin intens. Konflik-konflik internal yang terjadi di Darfur, Kordofan, dan Blue Nile, semakin sulit diatasi karena pemerintahan pusat tidak mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Ketimpangan ini tentu berlawanan dengan prinsip ketatanegaraan dimana *direct demokrasi* (demokrasi secara langsung) dilaksanakan secara baik di negara-negara, dimana komunikasi pemerintah dengan rakyatnya terkoordinasi secara kolektif, aspirasi mereka bisa terdengar, keluhan mereka bisa diberikan solusi atas permasalahan-permasalahan wilayah.

Menurut Herodotus, setiap warga dapat terlibat secara langsung dalam berbagai keputusan politik. Dalam konteks negara-negara modern dewasa ini, penerapan demokrasi langsung sangatlah sulit dilaksanakan, jumlah penduduk yang relatif besar di Sudan dan struktur sosial politik yang kompleks di negara-negara modern hanya memungkinkan diterapkannya *representatif government* atau *indirect democracy* (demokrasi melalui sistem perwakilan).<sup>10</sup>

Selain itu, ketimpangan ekonomi antara wilayah pusat dan daerah juga memperburuk ketegangan yang ada. Wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Darfur dan Kordofan, sering kali merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah pusat. Istilah tersebut adalah *Justice of Recognition* (politik pengakuan) yang menekankan pentingnya eksistensi keragaman cara dan ide masyarakat Darfur dan Kordofan dalam mengelola alam, yang mungkin berbeda dengan cara pemerintah dan ahli memandang cara mereka dalam pengelolaan alam. Jika dikomparasikan antara ahli dan penduduk, mungkin lebih banyak hasil dan solusi atas sumber daya alam, sehingga tidak menjadi tamu di wilayahnya sendiri atau disebut korporasi asing. Akibatnya, ketidakpuasan yang sudah ada semakin mendalam dan berkontribusi pada pecahnya konflik yang lebih besar.

Ketidakadilan di Sudan bersifat manipulatif-ekologis ini berawal dari cara pandang terhadap alam, yaitu cara pandang positivistik berbasis sains dianggap paling objektif, benar dan universal, meski kadang kurang efektif. Ini berimplikasi pada penguatan teknokratik berbasis sains dalam mengelola alam. Padahal di luar sains masih ada sistem pengetahuan lain yang dimiliki masyarakat yang juga akurat dalam melihat fenomena alam, kontradiksi ini yang mestinya diakhiri dengan mendorong kolaborasi sains dan pengetahuan lokal baik Darfur maupun Kordofan.<sup>11</sup>

Pengalaman sentralisasi di Sudan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang terlalu terpusat dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik, strategi terpusat atau sentralisasi seringkali bermasalah, untuk sebuah negara besar Sudan yang luas wilayahnya mencapai 1,89 juta km<sup>2</sup> mengendalikan sumber daya alam secara terpusat, utamanya segi biaya transaksi untuk pemantauan dan pengawasannya terlampau besar, imbasnya pada efektifitas pengelolaan, sulitnya pengelolaan sumber daya alam atas suatu rezim tertentu jika tidak efektif dan gagal maka akan tergeser ke rezim semi terbuka (investor), maka masalah baru yang timbul adalah kepemilikan bersama, dalam istilah Kevin Ells<sup>12</sup> disebut

---

<sup>10</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan*, (Gramedia; Jakarta, 2007), 87.

<sup>11</sup> Arif Satria, *Politik Sumber Daya Alam*, (Pustaka Obor Indonesia; Jakarta, 2019), 6.

<sup>12</sup> Kevin Ells, *The Tragedy of The commons*, (Jurnal A &M University; Texas, 2018), 763.

kepemilikan Bersama. Tragedi ini rentan mengakibatkan kerusakan lingkungan, terlebih tanpa adanya konsensus kepemilikan bersama, sehingga memicu kompetisi dan eksploitasi secara besar-besaran, terutama di negara dengan keragaman etnis dan budaya yang besar mereka tidak mendapatkan hasil apapun atas kerugian tersebut. Oleh karena itu, penerapan **federalisme** sebagai solusi untuk memberikan otonomi kepada wilayah-wilayah yang terpinggirkan menjadi sangat relevan. Sistem federal dapat menawarkan pembagian kekuasaan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan lokal mereka, dan mengakomodasi keragaman yang ada di Sudan.

Penerapan federalisme di Sudan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara pusat dan wilayah, memperkuat partisipasi politik lokal, serta memberikan ruang bagi kelompok etnis yang sebelumnya terpinggirkan untuk merasakan keadilan dan kesejahteraan. Seperti di Amerika Serikat dua pemerintahan yang terpisah federal dan negara bagian, pemerintah negara bagian memiliki wewenang terbatas atas seluruh 50 negara bagian. Mereka diberikan kekuasaan mengatur negara mereka masing-masing dan negara bagian tidak berhak membuat konstitusi negara serikat, atau dalam hal ini dapat disebut dibatasi.<sup>13</sup> Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menciptakan struktur federal yang inklusif dan mengurangi potensi ketegangan baru yang mungkin muncul akibat pembagian kekuasaan.

Upaya federalisme dalam perjanjian perdamaian di Sudan, khususnya melalui Comprehensive Peace Agreement (CPA) 2005 (perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri konflik antara pemerintah dan milisi), pernah diusulkan dan seharusnya menjadi langkah penting untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama antara pemerintah pusat dan wilayah selatan. CPA 2005, yang mengakhiri Perang Saudara Sudan kedua, mengakui kebutuhan akan otonomi yang lebih besar bagi wilayah selatan dan memberikan dasar bagi pembentukan Republik Sudan Selatan pada 2011. Perjanjian ini mencakup pembagian kekuasaan yang lebih adil, dengan pemberian otonomi daerah yang lebih luas bagi wilayah selatan serta hak untuk mengelola sumber daya alam dan kebijakan lokal mereka. Konsep federalisme menjadi inti dari penyelesaian ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keragaman etnis, agama, dan budaya di Sudan dihormati dan diakomodasi dalam sistem pemerintahan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, implementasi federalisme dalam kerangka CPA tidak tanpa tantangan, mengingat ketegangan yang terus ada antara pusat dan wilayah serta kesulitan dalam menyelesaikan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.

---

<sup>13</sup> Joane B. Hames, *Pengantar Hukum*, (Nuansa Cendikia, Bandung, 2021), 8.

## Penerapan Federalisme Atas Konflik Sudan

Peran militer dan kelompok elit dalam pengambilan keputusan di Sudan sangat signifikan, dengan militer sering kali berfungsi sebagai kekuatan utama yang memengaruhi kebijakan politik dan sosial negara. Sejak kemerdekaan, militer telah memainkan peran dominan dalam pemerintahan Sudan, baik melalui pemerintahan langsung maupun sebagai kekuatan yang mendukung pemerintahan sipil yang lebih lemah. Kelompok elit Janjawid,<sup>14</sup> yang terdiri dari individu-individu dengan koneksi politik dan ekonomi yang kuat, juga memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, namun sering kali mengejar kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Kombinasi kekuatan militer dan elit ini menciptakan sistem yang cenderung terpusat, dimana keputusan-keputusan penting diambil oleh segelintir orang, tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau aspirasi rakyat banyak. Kondisi ini memperburuk ketimpangan politik dan ekonomi, serta menghalangi terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif.

## Peluang dan Solusi atas Konflik Etnis di Sudan

Secara politik gejolak konflik, Sudan membutuhkan peran komunitas internasional dalam mendukung transisi Sudan menuju sistem federal, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi negara ini dalam mencapai perdamaian dan kestabilan jangka panjang. Federasi memang menciptakan garis perbedaan, dan mengubah sejumlah pilihan dan kendala yang dihadapi aktor politik di dua tingkat pemerintahan yang berbeda, sehingga mengubah preferensi aktor, serta seluruh struktur insentif. Negara-negara, organisasi internasional dan mekanisme stabilisasi konvensional (partai politik dan Yudisial) dapat memberikan arah dan kebijakan strategis baik dari segi diplomasi, bantuan teknis, maupun finansial, yang semuanya diperlukan untuk membantu Sudan dalam membangun landasan federal, landasan utamanya adalah interkoneksi yang inklusif, seperti istilah Kant yakni perdamaian akan dicapai dengan prinsip federal, meniru prinsip hubungan antar individu dimana *rule of the law* atau konstitusinya menjadi landasan interaksi.<sup>15</sup> Salah satu kontribusi utama yang dapat diberikan adalah menjadi fasilitator dalam dialog antara pemerintah pusat dan wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan, seperti Darfur, Kordofan, dan Blue Nile.

Melalui mediasi internasional, jika mediasi internasional gagal, berkemungkinan jalan perang (militer dan kekerasan) atau jalan damai, peran yang dimainkan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional, cara ini tergolong cara lama dan diakui secara internasional, komunitas internasional dapat membantu menyelesaikan konflik-

---

<sup>14</sup> Sebutan masyarakat Sudan dengan istilah militer yang dibentuk Omar Basher mengimbangi kekuatan politik oposisi, tanpa adanya rekrutmen formal atau tentara bayaran.

<sup>15</sup> Vinsensio Dugis, *teori Hubungan Internasional perspektif-perspektif klasik*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2018), 91.

konflik dan menciptakan kesepakatan dengan upaya damai terlebih dahulu.<sup>16</sup> Namun, upaya damai secara perang ini, banyak akademisi tidak sepakat. Cara ini tergolong klasik dan melihat bahayanya zaman sekarang negara-negara memiliki senjata pemusnah massal, maka menurut para ahli harus dihapuskan.<sup>17</sup>

Karena sengketa internasional ada disebabkan dua hal; yakni sengketa hukum dan sengketa politik, keduanya bisa diselesaikan tanpa adanya kekerasan, sebab perang adalah upaya damai yang gagal, sedangkan damai adalah upaya konflik yang gagal. Untuk menjembatani kasus di Sudan didalam penerapan federalisme sebagai jalan keluar dari ketidakadilan yang selama ini ada dan menyorot perhatian publik, selain itu, organisasi internasional seperti PBB atau Uni Afrika dapat berperan dalam memberikan saran teknis terkait pembuatan undang-undang atau amandemen konstitusi yang mendukung sistem federal, serta pembentukan lembaga-lembaga strategis yang akan mengelola desentralisasi kekuasaan. Komunitas internasional semisal Food And Agricultural Organization (FAO),<sup>18</sup> suatu organisasi dunia di bawah naungan PBB yang didirikan pada tahun 1945. FAO bertujuan untuk mengentaskan kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan global, melalui pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yakni perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional dengan cara mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, dan subsidi. GATT ditandatangani pada tahun 1947 dan berlaku mulai 1 Januari 1948.<sup>19</sup> Perjanjian ini kemudian menjadi cikal bakal Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada tahun 1995.

Di samping itu, mereka dapat membantu memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dengan memberikan pelatihan bagi pejabat-pejabat lokal, komunitas-komunitas internasional banyak yang bergerak di beragam sektor. Sehingga turut serta berkontribusi dan fokus masalah sesuai dengan segmentasi mereka, agar mereka turut berempati dan berkontribusi dalam mempermudah tata kelola *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan Masyarakat.<sup>20</sup> Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa transisi ke federalisme berjalan dengan lancar, mengurangi ketegangan sosial, dan memperkuat perdamaian serta kohesi nasional. Melalui kerjasama yang erat dengan komunitas internasional, Sudan dapat lebih efektif menerapkan sistem federal yang memberikan keadilan dan keberagaman yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (sinar Grafika; Jakarta, 2020), 2.

<sup>17</sup> Nisa', khoirul. 2018. "Konflik Sosial Keagamaan Antar Muslim Di Dusun Kecil Dan Terpencil". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (1), 35-48. <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.63>.

<sup>18</sup> [Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations](#)

<sup>19</sup> [General Agreement on Tariffs and Trade \(GATT\) | Britannica](#)

<sup>20</sup> Erica Harper, *International law and standart Applicable in natural disaster situation*, (Grasindo; Jakarta, 2015),64.

## KESIMPULAN

Penerapan federalisme dapat memberikan otonomi lebih besar kepada daerah-daerah ini, memungkinkan mereka untuk mengelola urusan politik, ekonomi, dan budaya sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini dapat mengurangi ketegangan etnis dan politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, peran komunitas internasional yang sangat krusial dalam mendukung transisi ke federalisme di Sudan. Dukungan berupa diplomasi, bantuan teknis, serta sumber daya finansial dapat membantu Sudan merancang dan menerapkan sistem federal yang efektif, mengurangi ketegangan, dan membangun institusi yang mampu mengelola desentralisasi kekuasaan dengan baik. Dengan kerjasama internasional yang kuat, Sudan dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal dan memastikan transisi menuju federalisme berjalan secara damai dan berkelanjutan. Federalisme memiliki potensi besar untuk membantu Sudan mengatasi konflik yang berkepanjangan dan menciptakan negara yang lebih stabil dan inklusif, meskipun tantangan besar tetap ada dalam implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Tafsir At Tauhidi Hasan Turobi, (Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir; issn 19077246 IAIN Kudus).
- Abdullah Al Ghallab, Hasan al-Turabi, the Last of the Islamists: (The Man and His Times 1932–2016).
- Abdullah Al Ghallab, *Hasan al-Turabi, the Last of the Islamists: (The Man and His Times 1932–2016)*.
- Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan, (Gramedia; Jakarta, 2007).
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan*, (Gramedia; Jakarta, 2007).
- Arif Satria, Politik Sumber Daya Alam, (Pustaka Obor Indonesia; Jakarta, 2019).
- Arif Satria, *Politik Sumber Daya Alam*, (Pustaka Obor Indonesia; Jakarta, 2019).
- BBC, , ٢٩ مايو / أيار ٢٠٢٣ , "كل ما يمكن للمدنيين استخدامه", اشتباكات السودان: أزمة في دارفور بعد تدمير "كل ما يمكن للمدنيين استخدامه" - BBC News عربي
- Abdul Karim, Tafsir At Taubidi Hasan Turobi, (Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir; issn 19077246 IAIN Kudus).
- BBC, , ٢٩ مايو / أيار ٢٠٢٣ , "اشتباكات السودان: أزمة في دارفور بعد تدمير "كل ما يمكن للمدنيين استخدامه" , [عربي BBC News - "كل ما يمكن للمدنيين استخدامه" اشتباكات السودان: أزمة في دارفور بعد تدمير](#)
- Erica Harper, International law and standart Aplicable in natural disaster situation, (Grasindo;

Jakarta, 2015).

Erica Harper, *International law and standart Aplicable in natural disaster situation*, (Grasindo; Jakarta, 2015).

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (sinar Grafika; Jakarta, 2020)

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (sinar Grafika; Jakarta, 2020)

Joane B. Hames, *Pengantar Hukum*, (Nuansa Cendikia, Bandung, 2021).

Joane B. Hames, *Pengantar Hukum*, (Nuansa Cendikia, Bandung, 2021).

Kevin Ells, *The Tragedy of The commons*, (Jurnal A &M University; Texas, 2018).

Kevin Ells, *The Tragedy of The commons*, (Jurnal A &M University; Texas, 2018).

Mardila, Riana. 2024. "Ummah for Earth: The Influence of Religious Soft Power Manifestation in Greenpeace Indonesia's Strategies". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (3), 571-89. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.4771>.

Montesqueu, *The Spirit of The Law Montesqueiu*, (Printed J.Nourse and P. Vaillant, in the strand MDCCI).

Montesqueu, *The Spirit of The Law Montesqueiu*, (Printed J.Nourse and P. Vaillant, in the strand MDCCI).

Nisa', khoirul. 2018. "Konflik Sosial Keagamaan Antar Muslim Di Dusun Kecil Dan Terpencil". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (1), 35-48. <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.63>.

Robert O. Collin, *A History of Modern Sudan*, (Cambridge University Press 978-0-521-85820-5, 1933).

Robert O. Collin, *A History of Modern Sudan*, (Cambridge University Press 978-0-521-85820-5, 1933).

Taufikurrahman, Taufikurrahman, and Dina In'am Nurida. 2023. "Nilai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Islam". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (3), 455-65. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3552>.

Vinsensio Dugis, *teori Hubungan Internasional perspektif-perspektif klasik*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2018).

Vinsensio Dugis, *teori Hubungan Internasional perspektif-perspektif klasik*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2018).